

Ecces

Economics, Social, and Development Studies

POSISI PENDUDUK KOTA MAKASSAR DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN EKONOMI

Abdul Rahman dan Nur Rahmi Hamzah

EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rapiuddin dan Bahrul Ulum Rusydi

STRUKTUR EKONOMI DAN POLA PEMBANGUNAN DAERAH
DI KAWASAN MAMMINASATA

Husni Mubarak dan Hasbiullah

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR

Ikhwan dan Siradjuddin

PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR

Irmayanti dan Aulia Rahman Bato

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRODUKSI JAGUNG DI DESA TANAH TOWA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Kamaluddin dan Andi Faisal Anwar

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2011-2015

Syaripuddin dan Abdul Wahab

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Ecces

Economics, Social, and Development Studies

VOLUME 4 NOMOR 1 JUNI 2017

- POSISI PENDUDUK KOTA MAKASSAR DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN EKONOMI
Abdul Rahman dan Nur Rahmi Hamzah 1-22
- EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rapiuddin dan Bahrul Ulum Rusydi 23-39
- STRUKTUR EKONOMI DAN POLA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAWASAN
MAMMINASATA
Husni Mubarak dan Hasbiullah 40-48
- PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR
Ikhwan dan Siradjuddin 49-55
- PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR
Irmayanti dan Aulia Rahman Bato 56-66
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRODUKSI JAGUNG DI DESA TANAH
TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Kamaluddin dan Andi Faisal Anwar 67-76
- ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2011-2015
Syaripuddin dan Abdul Wahab 77-102

EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rapiuddin¹
Bahrul Ulum Rusydi²

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis efisiensi teknis anggaran bidang pendidikan dan bidang kesehatan di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dengan menggunakan analisis efisiensi ini, dapat juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui sumber ketidakefisienan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta memberi masukan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten/kota yang belum efisien agar daerah tersebut dapat menjadi efisien.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan asumsi *Variabel Return to Scale* (VRS). Analisis DEA di desain secara spesifik untuk mengukur efisiensi relative dalam kondisi banyak input maupun banyak output. Penggunaan biaya perkapita pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagai variabel input, penggunaan rasio guru per murid (RGM), rasio sekolah per murid (RSM), rasio jumlah dokter dan jumlah puskesmas sebagai variabel *intermediate output* serta angka melek huruf (AMH), angka partisipasi sekolah (APS), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH) sebagai variabel *outcome*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum efisien dalam teknis biaya maupun teknis sistem. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya pemborosan dalam belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang cukup besar namun tidak diikuti dengan layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta belum ada upaya perbaikan sistem untuk meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: *Efisiensi, Belanja Pendidikan dan kesehatan, Data Envelopment Analysis, Efisiensi teknis biaya, Efisiensi teknis sistem*

PENDAHULUAN

Belanja yang efisien diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Efisiensi dapat terjadi ketika dana yang tersedia secara cukup dapat memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu mencapai derajat

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id

masyarakat yang baik. Oleh karena itu, belanja yang efisien merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik terutama belanja di bidang pendidikan dan kesehatan.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2014, alokasi belanja kesehatan dan pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan yang signifikan besarnya. Proporsi anggaran belanja sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sebesar Rp340,656 Milyar dan untuk sektor pendidikan sebesar Rp119,067 Milyar. Pada tahun 2014 proporsi anggaran sektor kesehatan terjadi kenaikan sebesar Rp395,938 Milyar begitu pula dengan sektor pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp228,154 Milyar.

Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Sulawesi Selatan belum berkembang. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tidak merata. Rata-rata APS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sebesar 98,21% untuk usia 7-12 tahun dan 89,55% untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan APS terendah meliputi Kabupaten Sinderang Rappang (77,43%), Bone (83,95%), dan Maros (85,4%). Semakin tinggi jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan, semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Hal ini menggambarkan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata penduduk Sulawesi Selatan mengikuti pendidikan hanya sampai kelas tingkat SMP.³

Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan balita, serta gizi buruk. Angka kematian bayi di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 25 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007, angka kematian bayi Sulawesi Selatan 41 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita 37 kematian per 1000 kelahiran hidup atau menurun dari kondisi tahun 2007 sebesar 66 kematian per 1000 kelahiran

³BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

hidup. Tingginya nilai AKB suatu wilayah menunjukkan kesehatan di wilayah tersebut rendah.⁴

Pendidikan dan kesehatan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan kualitas pembangunan manusia (IPM). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dari belanja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan apakah sudah dikatakan efisiensi atau inefisiensi, hal itu yang menjadi latar belakang penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah "mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut".⁵

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

⁴*Ibid*

⁵Basri, Zainal Yusman, Subri Mulyadi, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 49

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{PP_k P}{PPK_1} < \frac{P_k PP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

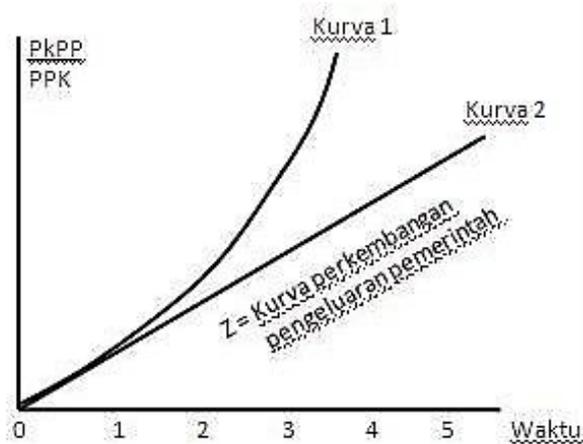
Dimana

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

n : Jangka waktu tahun

Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: Mangkoesoebroto, 1998

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva di atas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

Konsep Efisiensi

Efisiensi dapat dilihat dari 2 segi, pertama, hasil yang telah dicapai, dan kedua adalah usaha yang telah dilakukan. Suatu kegiatan dapat disebut efisien jika usaha yang telah dilakukan, memberikan output yang maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika

dengan usaha minimum dapat mencapai output tertentu. Usaha yang dimaksud mencakup material, pikiran, tenaga jasmani, ruang dan waktu. Jadi istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu “menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran dan masukan”.⁶

Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan output yang lebih besar. Jika pengertian efisiensi dijelaskan dengan pengertian input-output maka efisiensi merupakan rasio antara output dengan input atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$E = O/I$$

Keterangan :

E = Efisiensi

O = Output

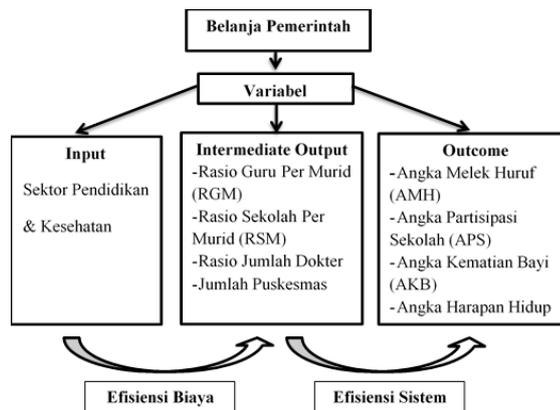
I = Input

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pada hasil telaah teoritis dan pengamatan empiris sederhana, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

⁶Muhammad Basir Paly, *Pengukuran Efisiensi dan Produktivitas Usaha Tani* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 66.



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Dalam menganalisis tingkat efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel input yaitu belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, variable output intermediate yang terdiri dari Rasio Guru per Murid (RGM), Rasio Guru per Sekolah (RMS), rasio jumlah dokter, rasio jumlah puskesmas, dan variabel outcome yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH).

Model Analisis

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah sebuah metode optimasi program matematika yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit *Decision Making Unit* (DMU) dan membandingkan secara relative terhadap DMU lain".⁷ DEA merupakan suatu teknik pemrograman matematis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah kumpulan unit-unit pembuat keputusan (DMU) dalam mengelola sumber daya (input) sehingga menjadi hasil (output) di mana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui.

Sedangkan menurut Cooper DEA menggunakan teknis program matematis yang dapat menangani variabel dan batasan yang banyak, dan tidak membatasi input dan output yang akan dipilih karena teknis yang dipakai dapat

⁷Charnes, A, WW Cooper and E Rhodes, *Measuring the efficiency of Decision Maing Units*. European Journal of Operational Research 2, (North : Holland Publising Company, 1978), h. 429-444

mengatasinya.⁸ DMU adalah organisasi-organisasi atau entitas-entitas yang akan diukur efisiensinya secara relatif terhadap sekelompok entitas lainnya yang homogen. Homogen berarti input dan output dari DMU yang akan divalusi harus sama/sejenis. DMU dapat berupa entitas komersial maupun publik, seperti bank komersial atau pemerintah, sekolah negeri atau swasta, rumah sakit dan sebagainya.

Metode analisis yang digunakan adalah metode non parametric dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA merupakan prosedur yang didesain relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output (multi-input multi-output) di mana penggabungan input dan output tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam metode penelitian ini melibatkan input pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Selatan sedangkan output intermediate yaitu rasio guru/murid, rasio sekolah murid, rasio jumlah dokter dan jumlah puskesmas dan menggunakan outcome yang meliputi angka melek huruf angka partisipasi sekolah, angka kematian bayi dan angka harapan hidup.

Efisiensi yang diukur oleh analisis DEA memiliki karakter berbeda dengan konsep efisiensi pada umumnya. Pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis, artinya, analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda. Kedua, nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relative, atau hanya berlaku dalam sekumpulan UKE yang diperbandingkan tersebut.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai efisiensi teknis biaya pendidikan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dengan menggunakan variabel input berupa nominal jumlah belanja pendidikan yang dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Adapun variabel output yang digunakan untuk menghitung nilai

⁸William Cooper, Lawrence M. Seiford and Joe Zhu. Chapter 1 : Data Envelopment Analysis : History, Model and Interpretations. <http://users.wpi.edu/~jzhu/dea/hbchapter1.pdf>

⁹Nugroho Purwantoro, *Efektitas Kinerja Pelabuhan dengan data Envelopment Analysis (DEA)*, *Manajemen Usahawan Indonesia* No. 05, Th XXXIII, 2004.

efisiensi teknis adalah variabel *output intermediate* berupa indikator yang tersedia adalah rasio guru per murid dan rasio murid per sekolah.

Asumsi yang digunakan adalah bahwa besarnya input belanja pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah mampu menghasilkan jumlah output fasilitas dan layanan pendidikan dengan besaran yang tidak sama. Perhitungan efisiensi teknis biaya ini menggunakan asumsi *Variabel Return to Scale* (VRTS) dan model orientasi input (*input oriented*).

Tabel 1. Nilai Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	Efisiensi			Rata-Rata Efisiensi
	2012	2013	2014	
Selayar	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Bulukumba	40.07%	37.34%	35.94%	37.78%
Bantaeng	92.62%	62.69%	100,00%	85.10%
Jeneponto	62.74%	45.93%	50.25%	52.97%
Takalar	44.95%	51.20%	56.44%	50.86%
Gowa	36.38%	35.63%	36.36%	36.12%
Sinjai	49.29%	48.80%	100,00%	66.03%
Maros	62.38%	39.17%	45.89%	49.15%
Pangkep	41.24%	38.43%	40.74%	40.14%
Barru	59.17%	54.29%	54.61%	56.02%
Bone	29.81%	31.11%	34.25%	31.72%
Soppeng	46.58%	45.48%	40.62%	44.23%
Wajo	48.94%	47.94%	48.23%	48.37%
Sidrap	50.27%	57.52%	63.36%	57.05%
Pinrang	51.66%	51.50%	50.19%	51.12%
Enrekang	71.94%	73.00%	50.78%	65.24%
Luwu	61.21%	49.10%	46.48%	52.26%
Tana Toraja	72.93%	78.79%	84.20%	78.64%
Luwu Utara	59.24%	61.94%	62.05%	61.08%
Luwu Timur	76.81%	86.00%	84.47%	82.43%
Toraja Utara	75.59%	85.18%	85.15%	81.97%
Makassar	24.62%	25.80%	28.66%	26.36%
Pare-Pare	100,00%	100,00%	78.69%	93.00%
Palopo	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Rata-rata Provinsi	61.00%	59.00%	62.00%	

Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Input Orientation, diolah

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis efisiensi teknis biaya pendidikan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan DEA dalam kurun waktu 2012-2014. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, hasil perhitungan nilai efisiensi teknis biaya pendidikan di 24 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang mencapai nilai efisiensi 100%, yaitu Kabupaten Selayar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.
- Pada tahun 2013 jumlah Kabupaten/Kota yang mampu mencapai skor efisiensi 100% tidak mengalami perubahan tetap berada pada kondisi tahun sebelumnya. Kota Makassar dengan rata-rata belanja paling tinggi jauh di atas lainnya yang mencapai Rp. 698.240.000,00 namun hanya memiliki skor efisiensi 25.80% paling rendah dan di bawah 50%. Hal ini sejalan dengan pendapat Greert dan Andreas bahwa pengeluaran relatif besar pada sektor pendidikan tidak selalu menghasilkan capain yang paling efisien.
- Pada tahun 2014 kondisi pencapai efisiensi teknis biaya pendidikan hanya 4 Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi 100% yaitu hanya Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai dan Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis biaya belum ada upaya yang secara signifikan telah dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun penelitian.
- Berdasarkan hasil perhitungan selama periode penelitian menunjukkan bahwa pencapain nilai efisiensi di seluruh Kabupaten/Kota hanya sebanyak 3 Kabupaten/Kota dari seluruh objek penelitian yang telah efisien 100% dalam menggunakan belanja pendidikan daerahnya secara konsisten selama periode penelitian.

Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan

Perhitungan efisiensi teknis sistem ini menggunakan asumsi *Variabel Return to Scale (VRS)* dengan orientasi output (*output oriented*). Berdasarkan hasil Tabel 2 dapat dijelaskan hasil empiris tentang efisiensi teknis sistem belanja pendidikan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, hasil perhitungan nilai efisiensi teknis sistem belanja sektor pendidikan di 24 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa terdapat 10

Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat efisiensi dengan nilai efisiensi mencapai 100%. Daerah Kabupaten/Kota yang meraih efisiensi yaitu Kabupaten Selayar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Pada tahun 2013 jumlah Kabupaten/Kota yang mampu mencapai skor efisiensi 100% menurun menjadi hanya 7 Kabupaten/Kota. Ada beberapa Kabupaten yang mengalami nilai efisiensi 100% pada tahun 2012 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Pangkep, kabupaten Sidrap, kabupaten Pinrang, kabupaten Enrekang dan kabupaten Toraja Utara.

- Tahun 2014, kondisi pencapaian efisiensi teknis sistem belanja pendidikan menjadi 8 Kabupaten/Kota. Hanya beberapa Kabupaten/Kota yang mampu bertahan dan konsisten efisiensi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum belum ada upaya perbaikan efisiensi teknis sistem pada kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Nilai Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	Efisiensi			Rata-Rata Efisiensi
	2012	2013	2014	
Selayar	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Bulukumba	95.62%	96.60%	95.34%	95.85%
Bantaeng	88.98%	89.71%	88.78%	89.16%
Jeneponto	100,00%	96.81%	90.00%	96.00%
Takalar	93.93%	94.79%	96.42%	95.05%
Gowa	91.70%	91.12%	91.99%	91.60%
Sinjai	96.78%	98.14%	98.52%	97.81%
Maros	98.33%	100,00%	100,00%	99.44%
Pangkep	100,00%	98.89%	97.54%	99.00%
Barru	98.91%	100,00%	98.99%	99.30%
Bone	94.05%	96.70%	95.30%	95.35%
Soppeng	95.49%	97.89%	100,00%	97.79%
Wajo	93.79%	95.96%	93.73%	94.49%
Sidrap	100,00%	96.37%	96.63%	98.00%
Pinrang	100,00%	95.73%	96.32%	97.00%
Enrekang	100,00%	99.53%	98.57%	99.00%
Luwu	94.67%	98.70%	96.46%	96.61%

Tana Toraja	97.16%	100,00%	100,00%	99.05%
Luwu Utara	99.61%	99.52%	98.72%	99.28%
Luwu Timur	97.61%	96.79%	100,00%	98.13%
Toraja Utara	100,00%	97.20%	96.99%	98.00%
Makassar	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Pare-Pare	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Palopo	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Rata-rata Provinsi	97.00%	98.00%	97.00%	

Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Output Orientation, diolah

Efisiensi Teknis Biaya Kesehatan

Nilai efisiensi teknis biaya kesehatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dengan menggunakan input variabel berupa nominal belanja kesehatan yang dikeluarkan masing-masing daerah. Adapun variabel output yang digunakan adalah variabel output intermediate berupa indikator fasilitas dan layanan yang tersedia adalah rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk, dan jumlah puskesmas.

Tabel 3 Nilai Efisiensi Teknis Biaya Kesehatan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	Efisiensi			Rata-Rata Efisiensi
	2012	2013	2014	
Selayar	96.08%	75.33%	64.45%	78.62%
Bulukumba	60.12%	61.07%	54.02%	58.40%
Bantaeng	74.14%	75.15%	72.19%	73.83%
Jeneponto	46.69%	45.05%	31.44%	41.06%
Takalar	61.70%	56.20%	49.27%	55.72%
Gowa	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Sinjai	75.82%	72.95%	44.54%	64.44%
Maros	84.05%	63.82%	65.68%	71.18%
Pangkep	69.51%	67.64%	60.33%	65.83%
Barru	71.07%	74.99%	67.77%	71.28%
Bone	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Soppeng	79.88%	57.94%	50.80%	62.87%
Wajo	71.45%	52.73%	57.46%	60.55%
Sidrap	58.05%	61.17%	53.35%	57.52%
Pinrang	51.61%	51.37%	37.97%	46.98%
Enrekang	65.57%	54.34%	41.78%	53.90%
Luwu	60.53%	57.57%	42.76%	53.62%
Tana Toraja	57.72%	54.45%	44.71%	52.29%
Luwu Utara	42.21%	42.82%	33.50%	39.51%

Luwu Timur	38.20%	40.74%	34.20%	37.71%
Toraja Utara	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Makassar	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Pare-Pare	40.84%	46.16%	40.94%	42.65%
Palopo	89.71%	94.63%	77.36%	87.23%
Rata-rata Provinsi	70.62%	66.92%	59.36%	

Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Input Orientation, diolah

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijabarkan secara empiris hasil perhitungan dengan cara efisiensi teknis biaya kesehatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2012, hasil perhitungan menggunakan efisiensi teknis biaya kesehatan terdapat 4 Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi 100%. Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang mampu mencapai efisien sementara belanja kesehatannya paling rendah yaitu sebesar Rp 37.910 (milyar) jauh dibawah rata-rata keseluruhan yang mencapai Rp. 106.071 (milyar).
- Pada tahun 2013, jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi 100% tidak mengalami perubahan. Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pare-Pare secara berurutan memiliki rata-rata skor efisiensi paling rendah, di mana proporsi belanja kesehatan Kabupaten tersebut jauh lebih besar dari daerah lainnya. Belanja kesehatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan tingkat efisiensi. Sementara daerah dengan belanja kesehatannya yang besar cenderung mengalami inefisiensi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Avonso, Schuknect dan Tanzi yang menyatakan bahwa negara dengan pengeluaran sektor publik yang lebih kecil cenderung untuk menjadi paling efisien dibanding negara yang pengeluaran sektor publiknya lebih besar.
- Sedangkan tahun 2014 kondisi pencapain efisiensi teknik biaya kesehatan hanya 4 Kabupaten/Kota yang bertahan dan konsisten mencapai efisiensi 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi secara teknis biaya kesehatan bahwa belum ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian.

Efisiensi Teknis Sistem Kesehatan

Tabel 4. Nilai Efisiensi Teknis Sistem Kesehatan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	Efisiensi			Rata-Rata Efisiensi
	2012	2013	2014	
Selayar	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Bulukumba	99.63%	99.28%	97.14%	98.68%
Bantaeng	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Jeneponto	100,00%	97.67%	97.67%	98.00%
Takalar	99.81%	96.75%	96.10%	97.55%
Gowa	99.85%	95.49%	98.32%	97.89%
Sinjai	99.92%	100,00%	97.44%	99.12%
Maros	99.78%	97.67%	97.15%	98.20%
Pangkep	99.80%	94.98%	95.44%	96.74%
Barru	100,00%	97.11%	97.00%	98.00%
Bone	99.78%	98.33%	96.76%	98.29%
Soppeng	99.71%	95.47%	96.68%	97.29%
Wajo	99.63%	96.58%	94.61%	96.94%
Sidrap	99.99%	97.70%	96.86%	98.18%
Pinrang	99.93%	96.97%	96.70%	97.87%
Enrekang	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Luwu	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Tana Toraja	99.79%	98.18%	100,00%	99.32%
Luwu Utara	99.91%	96.40%	95.97%	97.43%
Luwu Timur	100,00%	94.78%	98.34%	98.00%
Toraja Utara	99,97%	97.36%	100,00%	99.01%
Makassar	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Pare-Pare	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Palopo	99.81%	96.72%	99.19%	98.57%
Rata-rata Provinsi	100%	98.00%	98.00%	

Sumber : Hasil Perhitungan dengan DEA-VRS-Output Orientation, diolah

Hasil perhitungan DEA untuk efisiensi teknis sistem bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 4, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada tahun 2012-2014 secara berturut-turut terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi secara konsisten yaitu Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Pencapaian efisiensi 100% ini karena kabupaten-kabupaten tersebut dengan input dokter dan jumlah puskesmas yang ada telah mampu menghasilkan output yang tinggi yaitu angka harapan hidup yang tinggi. Hal ini mempunyai makna bahwa dengan input sumber daya dan fasilitas yang ada telah mampu menekan angka kematian bayi sebagai indikator penentu derajat kesehatan yang baik.
- Sedangkan daerah Kabupaten/Kota yang belum efisien, hal ini terjadi karena input dokter dan jumlah puskesmas yang ada menghasilkan output berupa angka kematian bayi yang masih tinggi. Walaupun skor efisiensi teknis sistem sudah baik mendekati angka 100% yang artinya rasio dokter per penduduk sudah ideal, namun daerah tersebut cukup luas misalnya Kabupaten Luwu Timur cukup luas yaitu 6.994,88 km² dan kepadatan penduduk hanya 38,79 jiwa/km² sehingga hal tersebut menyulitkan tenaga dokter yang ada untuk memberikan pelayanan maksimal ke seluruh wilayah yang mengakibatkan capaian outputnya menjadi rendah.
- Kondisi tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian dari Afonso dan Aubyn yang mengemukakan bahwa negara-negara mungkin memiliki kebutuhan input yang berbeda untuk mencapai tingkat output yang sama, tergantung pada kepadatan populasi atau tingkat perkembangan ekonomi, bahkan dibawah pelayanan publik yang efisien.

Secara keseluruhan daerah yang mencapai kondisi efisiensi ideal dalam belanja pendidikan dan kesehatan baik secara teknis biaya maupun teknis sistem belum ada daerah Kabupaten/Kota yang mencapai efisiensi sempurna 100%. Dengan demikian di dalam perhitungan target perbaikan input dan output untuk seluruh Kabupaten/Kota sangat perlu perbaikan sesuai target yang harus dirubah.

Adapun secara umum perbaikan yang dapat dilakukan terkait dengan Kabupaten/Kota yang masih belum efisien secara teknis biaya maupun teknis sistem yaitu melakukan penekanan alokasi belanja baik di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga tidak terjadi pemborosan dan segera melakukan perbaikan, sedangkan perbaikan secara teknis sistem yaitu dengan cara meningkatkan peran guru dan dokter yang sudah ada untuk selalu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain pemerataan jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan berupa sekolah dan jumlah puskesmas yang tersedia agar lebih ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mencapai derajat pendidikan dan kesehatan yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2014 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama periode penelitian ditemukan hasil empiris bahwa secara rata-rata pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami inefisiensi dalam teknis biaya pendidikan dan kesehatan di masing-masing daerahnya. Fenomena ini digambarkan dengan pencapaian nilai efisiensi teknis biaya untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang secara umum masih jauh lebih sedikit dibandingkan nilai efisiensi teknis sistem. Adapun daerah yang sudah mencapai kondisi efisien selama periode penelitian untuk efisiensi teknis biaya sektor pendidikan yang konsisten maksimum 100% adalah Kabupaten Selayar dan Kota Palopo, sedangkan daerah yang sudah mencapai skor efisiensi dalam teknis sistem adalah Kabupaten Selayar, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.
2. Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami inefisiensi dalam teknis biaya pendidikan dan kesehatan mencerminkan bahwa daerah tersebut belum mampu menggunakan belanja kesehatan yang dianggarkan pemerintahnya secara optimal. Lebih lanjut, daerah yang tidak efisien dalam teknis biaya juga mengindikasikan bahwa di daerah tersebut telah terjadi pemborosan biaya belanja pendidikan dan kesehatan yang terlalu

besar namun tidak diikuti dengan peningkatan layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar yang dibutuhkan masyarakat.

3. Daerah yang secara teknis sistem belum efisien berarti bahwa daerah tersebut belum mampu menggunakan input sumberdaya berupa layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan optimal. Temuan ini memberi arti lebih jauh bahwa dalam rangka mencapai pembagunan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu adanya perbaikan sistem untuk meningkatkan peran dan manfaat dari layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah tersedia agar lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, Antonio dan Miguel st. Aubyn. *Non-parametric Approaches to Education and Health Efficiency in OECD Countries*. Journal of Applied Economics, Vol III No. 002. 2005.
- *Cross Country Efficiency of Secondary Education Provisnsion : A Semi Paramertic Analysis with Nondiscretionary input*, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Basir, Muhammad Paly. *Pengukuran Efisiensi dan Produktivitas Usaha Tani*, Makassar : Alauddin University Press, 2011.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta : BPFE, 1982.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.
- Charnes, A, WW Cooper and E Rhodes, *Measuring the efficiency of Decision Maing Units*. European Journal of Operational Research 2, North : Holland Publising Company, 1978.
- Cooper, William, Lawrence M. Seiford and Joe Zhu. Chapter 1 : Data Envelopment Analysis : History, Model and Interpretations.
- Daniel, Setyo Budi . *Efisiensi Relatif Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2009*, Tesis MPKP FE UI, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yaysan Al Furqan, 2008.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Erniwati, dkk, *Refleksi 5 Tahun Otonomi Awards*. Makassar: FIPO, 2013.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

- Firda, Asnita Sebayang. *Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Crisis*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, 2005.
- Halim. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Edisi Revisi : BPFE, 2008.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pres, 2010.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014
- Lena, Dina Pertiwi. *Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.2 : Yogyakarta, 2007.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta, 2004.
- Muhmidayeli. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Noor, Isran. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Kutai Kartanegara: Seven Strategic Studies, 2012.
- Purwanto, Nugroho, *Efektitas Kinerja Pelabuhan dengan data Envelopment Analysis (DEA), Manajemen Usahawan Indonesia No. 05,Th XXXIII, 2004*.
- Qomaruddin, Saleh dkk. *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro, 2011.
- Setyo, Daniel Budi, *Efisiensi Relatif Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2009*, Tesis MPKP FE UI, 2010.
- Sudirman, Wayan. *Kebijakan Fiskal dan moneter : Teori & Empirikal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- al-Syaebani, Omar Mohammad al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Syagir Kurnia, Akhmad. *Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Publik M Metode Free Disposable Hull (FDH)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 2, 2006.
- Tirtarahardja, Umar & La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Pergaulan, 2004.
- Wijaya, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zainal, Yasman Basri dan Subri Mulyadi. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

E C C E S

Economics, Social, and development Studies

Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin

Kampus II Jl. Slt Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa Telp (424835)

Email: ecces@uin-alauddin.ac.id

Aturan penulisan Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

1. Artikel harus berupa tulisan asli, merupakan hasil penelitian maupun kajian dalam bidang ekonomi terapan dan belum pernah dipublikasikan di media manapun serta bebas dari unsur-unsur plagiarisme.
2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan memenuhi kaidah EYD Bahasa Indonesia.
3. Sistematika penulisan:
 - a. Bagian awal: judul, nama penulis (dituliskan lengkap tanpa gelar), abstrak yang tidak lebih dari 300 kata dan diketik dengan satu spasi yang berisi latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil penelitian.
 - b. Bagian utama: pendahuluan, tinjauan teoritis dan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.
 - c. Bagian akhir: daftar pustaka, dan lampiran.
4. Judul artikel ditulis dengan menggunakan huruf kapital.
5. Teknik penulisan:
 - a. Alinea baru dimulai pada ketikan kelima pada batas tepi kiri. Antar alinea tidak diberi tambahan spasi.
 - b. Penggunaan kata asing ditulis dengan menggunakan huruf miring (*italic*).
 - c. Batas pengetikan: tepi kiri tiga cm, tepi kanan dua cm, tepi atas tiga cm, dan tepi bawah dua cm.
 - d. Tabel, gambar, dan ilustrasi lainnya diberikan judul, nomor, dan sumber yang jelas.
 - e. Sumber pustaka ditulis nama-tahun (nama belakang penulis, tahun penerbitan). Nama penulis harus tepat sama dengan yang tercantum dalam daftar pustaka.
6. Naskah diketik dengan MS Word, spasi satu, ukuran font 11, huruf Arial, dengan panjang minimum-maksimum 15-20 halaman (A4).
7. Tulisan harus dikirim paling lambat 1 bulan sebelum penerbitan jurnal ke email jurnal Ecces atau diserahkan langsung ke tim pengelola dalam bentuk CD.
8. Jurnal Ecces terbit 2 kali dalam setahun, yaitu Juni dan Desember.
9. Email jurnal Ecces: jurnalecces@gmail.com

